

# **REVITALISASI PROGRAM STUDI PLB DALAM MENGHADAPI PROGRAM INKLUSI \*)**

**Oleh  
Edi Purwanta \*\*)**

## **Pendahuluan**

Pendekatan pendidikan luar biasa dari waktu ke waktu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan pandangan tokoh pendidikan terhadap anak luar biasa beserta filosofinya. Dalam upaya untuk menjadikan kemandirian anak luar biasa para pakar pendidikan telah berupaya memperbaiki sistem pendidikan luar biasa dari sistem pendidikan segregasi ke sistem pendidikan integrasi yang dengan penekanan pada mainstriming. Upaya perbaikan akhir-akhir ini mengarah ke pendekatan inklusi. Sejalan dengan itu pada Seminar dan Lokakarya FIP dan JIP se Indonesia di Surabaya ini penulis memberikan urunan pemikiran peran program studi PLB dalam menghadapi program inklusi.

Beberapa pertimbangan dipilihnya judul ini adalah (1) tantangan Pendidikan Luar Biasa di Indonesia sangat besar, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sementara kapasitas pemerintah dan masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan bagi mereka masih sangat terbatas; (2) Pendidikan Luar Biasa dewasa ini masih ditangani secara semi-desentralistik, di mana peran pemerintah pusat dan propinsi masih tampak dominan; (3) dengan disyahnannya Undang-Undang tentang Sisdiknas yang di dalamnya terdapat pasal-pasal tentang “pendidikan khusus” akan mempunyai implikasi tertentu terhadap penyelenggaraan pendidikan luar biasa di

-----

\*) Makalah penyerta disampaikan pada Temu Nasional FIP/JIP di Unesa Surabaya tanggal 16 – 18 Oktober 2003

\*\*\*) Staf Pengajar pada FIP Universitas Negeri Yogyakarta

Indonesia baik pada lembaga yang mengurus persiapan ketenagaannya maupun lembaga penyelenggara pendidikan luar biasa; (4) sejak beberapa tahun terakhir telah berkembang berbagai inovasi dalam pendidikan luar biasa yang mengarah pada program pendidikan terpadu dan inklusi

### **Pendidikan Inklusi**

Pendidikan inklusi merupakan perwujudan dari pendekatan inklusi yang diupayakan untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak luar biasa secara integral dan manusiawi. Menurut Staub dan Peck (1994/1995) mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak luar biasa tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas biasa. Definisi ini secara jelas menganggap bahwa kelas biasa merupakan penempatan yang relevan bagi semua anak luar biasa, bagaimanapun tingkatannya.

Dalam pendidikan inklusi, layanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan – kebutuhan khusus anak secara individual dalam konteks kebersamaan secara klasikal. Dalam pendidikan ini tidak dilihat dari sudut ketidakmampuannya, kecacatannya, dan tidak pula dari segi penyebab kecacatannya, tetapi lebih pada kebutuhan –kebutuhan khusus mereka. Kebutuhan mereka jelas berbeda dari satu dengan yang lain.

Ada beberapa alasan pentingnya pendidikan inklusi dikembangkan dalam layanan pendidikan bagi anak luar biasa. Alasan tersebut antara lain:

1. Semua anak, baik cacat maupun tidak mempunyai hak yang untuk belajar bersama-sama dengan anak yang lain.
2. Seyogyanya anak tidak diberi label atau dibeda-bedakan secara rigid, tetapi perlu dipandang bahwa mereka memiliki kesulitan dalam belajar.

3. Tidak ada alasan yang mendasar untuk memisah-misahkan anak dalam pendidikan. Anak memiliki kebersamaan yang saling diharapkan di antara mereka. Ia tidak pernah ada upaya untuk melindungi dirinya dengan yang lain.
4. Penelitian menunjukkan bahwa anak cenderung menunjukkan hasil yang baik secara akademik dan sosial bila mereka berada pada setting kebersamaan.
5. Tidak ada layanan pendidikan di SLB yang mampu mengambil bagian dalam menangani anak di sekolah pada umumnya.
6. Semua anak membutuhkan pendidikan yang dapat mengembangkan hubungan antar mereka dan mempersiapkan untuk hidup dalam masyarakatnya.
7. Hanya pendidikan inklusi yang potensial untuk menekan rasa takut dalam membangun kebertemanan, tanggung jawab, dan pemahaman diri.

Dengan memperhatikan beberapa alasan tersebut, jelas dalam pendidikan inklusi kebutuhan anak akan terpenuhi sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Kebutuhan anak dapat berupa kebutuhan yang bersifat sementara, permanen, dan kultural. Kebutuhan sementara merupakan kebutuhan yang terjadi pada saat tertentu yang dialami oleh seorang anak. Pada saat anak mendapat musibah, misalnya di sekolah ia tampak sedih dan membutuhkan perhatian khusus. Anak membutuhkan orang lain untuk mencurahkan perasaan sedihnya.

Kebutuhan permanen anak luar biasa berupa kebutuhan untuk hidup mandiri dan wajar selayaknya orang lain dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seseorang anak luar biasa dikatakan hidup normal apabila ia hidup bersama keluarga, dan belajar bersama-sama dengan anak-anak lain yang sebaya. Apabila ia hidup di asrama, belajar

di sekolah khusus terpisah dengan anak lain di sekolah reguler, maka kehidupan anak tersebut tidak wajar.

Kebutuhan kultural berkaitan dengan penerimaan kelompok terhadap anak di mana anak berada. Seorang anak perlu memperoleh kemudahan untuk diterima sebagai anggota dalam lingkungan kelompoknya. Seorang anak luar biasa mengalami banyak hambatan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hal ini disebabkan keberadaan dirinya yang mempunyai keterbatasan beradaptasi dengan anggota-anggota lain di lingkungannya.

Di samping itu, masyarakat sendiri belum sepenuhnya memahami kebutuhan anak luar biasa sehingga mereka kadang-kadang bersikap kurang menerima kehadiran anak luar biasa. Keterbatasan fasilitas dan tidak fleksibelnya sistem pendidikan yang ada sekarang dan suasana lingkungan di sekolah tidak menjamin rasa aman bagi anak luar biasa dalam berintegrasi dengan lingkungannya.

Pemenuhan kebutuhan anak luar biasa memerlukan perubahan-perubahan baik dalam sistem pendidikan, metode, maupun lingkungan, sehingga anak dapat menyesuaikan diri. Dalam pendidikan inklusi, pemenuhan kebutuhan anak luar biasa tidak dimulai dari penyesuaian-penyediaan anak terhadap sistem pendidikan, metode, maupun lingkungannya, melainkan seharusnya yang terjadi sebaliknya. Dalam suasana kelas, bukan anak yang menyesuaikan kurikulum, tetapi kurikulumlah yang harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Mendukung alasan perlunya pendidikan inklusi, beberapa argumen para pendukung pendidikan inklusi adalah sebagai berikut (Sunardi, 1995);

1. Belum ada banyak bukti empiris yang mendukung asumsi bahwa layanan pendidikan khusus yang diberikan di luar kelas biasa menunjukkan hasil yang lebih positif bagi anak.
2. Biaya pendidikan luar biasa yang relatif lebih mahal dari pada pendidikan umum.
3. Pendidikan di luar kelas biasa mengharuskan penggunaan label luar biasa yang dapat berakibat negatif bagi anak.
4. Banyak anak luar biasa yang tidak mampu memperoleh layanan pendidikan karena tidak tersedia di sekolah terdekat.
5. Anak luar biasa harus dibiasakan tinggal dalam masyarakat bersama warga masyarakat lainnya.

### **Karakteristik Pendidikan Inklusi**

Ada beberapa karakteristik pendidikan inklusi yang dapat dijadikan dasar layanan pendidikan bagi anak luar biasa. Karakteristik tersebut antara lain:

1. Pendidikan inklusi berusaha menempatkan anak dalam keterbatasan lingkungan seminimal mungkin, sehingga ia mampu berinteraksi langsung dengan lingkungan sebayanya atau bahkan masyarakat di sekitarnya.
2. Pendidikan inklusi memandang anak bukan karena kecacatannya, tetapi menganggap mereka sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus (children with special needs) untuk memperoleh perlakuan yang optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak.
3. Pendidikan inklusi lebih mementingkan pembauran bersama-sama anak lain seusianya dalam sekolah reguler.

4. Pendidikan inklusi menuntut pembelajaran secara individual, walaupun pembelajarannya dilaksanakan secara klasikal. Proses belajar lebih bersifat kebersamaan dari pada persaingan.

### **Revitalisasi Program Studi PLB**

Sejalan dengan semboyan “education for all, EFA -- “Pendidikan bagi semua” yang oleh Pemerintah Indonesia telah tertuang dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 memberikan peluang untuk berkembangnya penanganan anak luar biasa. Namun kenyataan sekarang sangat dilematis. Data terakhir peserta didik yang masuk dalam PLB hanya sekitar 48 ribu orang. Sementara Nurkolis (2002) menyatakan bahwa jumlah itu hanya mewakili 3,7 % dari sekitar 1,3 juta populasi anak usia sekolah yang memerlukan layanan melalui pendidikan luar biasa. Apabila digunakan asumsi bahwa populasi ALB sebesar 2,3 % dari dari seluruh populasi anak usia sekolah tahun 2000 mencapai 76,5 juta, maka jumlah ALB mencapai 1,76 juta. Dengan jumlah siswa yang telah ditangani baru hanya 48 ribu orang ini berarti hanya 2,7 % dari populasi ALB yang berada dalam PLB. Merekapun termasuk yang berada pada segregatif dan di sekolah-sekolah biasa dalam bentuk sekolah terpadu yang selama ini telah berlangsung. Kenyataan ini memberikan tantangan yang cukup serius untuk menanggapi mereka.

Secara kelembagaan PLB, kebijakan yang telah ditempuh adalah ditingkatkannya Sub-Direktorat PLB menjadi Direktorat PLB di tingkat pusat sejak tahun 2000 (melalui Keputusan Mendiknas No. 010/O/2000) memberi peluang untuk mempercepat perkembangan PLB utamanya dalam penanganan anak untuk

memperoleh kesempatan belajar . Dengan kewenangan yang lebih besar yang dimilikinya Direktorat PLB saat ini dapat mengembangkan program-program yang lebih ekstensif dan intensif, baik untuk mencapai sasaran-sasaran kuantitatif maupun kualitatif PLB. Begitu pula posisi tawar-menawarnya menjadi lebih kuat dalam memperjuangkan peningkatan anggaran untuk mendukung program-programnya; seperti terbukti semakin meningkatnya alokasi anggaran PLB untuk tahun-tahun terakhir beserta program-programnya (Direktorat PLB, 2003).

Untuk mendukung itu semua, perlu revitalisasi program studi yang menangani pendidikan luar biasa pada khususnya dan program-program studi lain yang menghasilkan guru atau pendidik baik di tingkat pendidikan pra sekolah sampai di tingkat pendidikan menengah. Bererapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Perbaikan struktur kurikulum baik yang menyangkut isi kurikulum maupun komponen-komponen lain beserta factor lain yang mendukungnya. Utamanya upaya memasukkan konsep inklusi dalam berbagai komponen bidang studi yang mendukung. Secara konseptual, pendidikan inklusi memiliki kerangka kerja memiliki kerangka kerja dan strategi intervensi yang sistematis, teruji, dan dapat diverifikasi. Secara keilmuan, pendidikan inklusi berbasis pada ilmu pendidikan, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menata ke bidang studi.
2. Perubahan system diagnosis dalam menangani anak ke pendekatan assesmen mendorong terealisasinya pendidikan inklusi. Tekanan utama dalam pendidikan inklusi adalah mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin dalam lingkungan “wajar”, sehingga ia dapat diterima dilingkungan tersebut dan berkembang dalam lingkungan tersebut.

3. Secara kelembagaan perlu ditata keterlibatan prodi-prodi di FIP atau di universitas yang mempunyai LPTK untuk mulai peduli pada anak luar biasa. Cara tersebut dapat ditempuh dengan memperkenalkan konsep inklusi dan orthopedagogi dalam pengembangan landasan pendidikan dan praktik pendidikan. Dalam tataran jangka panjang secara kelembagaan perlu dikembangkan system manajemen yang menjamin keterlaksanaan unifikasi pendidikan khusus dan pendidikan reguler di LPTK.
4. Penataan cultural dan kemasyarakatan, dalam hal ini pendidikan inklusi merupakan hal baru perlu diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia. Sikap, keyakinan, dan kultur dalam menerima dan memperlakukan anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini dianggap kurang menguntungkan akan merupakan salah satu kendala implementasi pendidikan inklusi. Gerakan menyeluruh dan pendidikan masyarakat yang menumbuhkan kesadaran dan kepedulian pada warga yang berkebutuhan khusus adalah suatu upaya yang harus dilakukan. Kesadaran dan kepedulian semacam ini akan berpengaruh kepada sikap masyarakat, termasuk masyarakat sekolah untuk membangun iklim belajar yang mendorong terjadinya “belajar bersama” dan “belajar hidup bersama” (Sunarya Kartadinata, 2003).
5. Pengembangan jaringan penanganan pendidikan luar biasa dalam menangani anak berkebutuhan khusus dengan berbagai instansi pemerinatah maupun LSM yang peduli terhadap anak berkebutuhan khusus dengan sentral informasi di LPTK PLB.

**Rujukan:**

Direktorat PLB. 2003. *Kebijakan-kebijakan Prioritas PLB* (Online). [http://www.Dikdasmen, depdiknas, go.id. ml/plb/plb-kebijakan\\_prioritas. html](http://www.Dikdasmen, depdiknas, go.id. ml/plb/plb-kebijakan_prioritas. html).



- Nurkolis. 2002. *Reformasi Kebijakan pendidikan Luar Biasa* (online). <http://www.Pendidikan.net/nurkolis2.html>.
- Smith, Deborah Deutch & Luchkason, Ruth. 1992. **Introduction to Special Education**.  
Boston: Allyn & Bacon
- Staub, D. & Peck, C.A. 1994/1995. What are the Outcomes for Nondisabled Student?.  
**Educational Leadership. 52. 4**
- Sunardi. 1992. Mainstreaming: Satu Alternatif bagi Penanganan Pendidikan bagi Semua Anak Cacat. **Jurnal Rehabilitasi dan Remidiasi. No. 1 Tahun I**
- Sunarya Kartadinata. 2003. **Reposisi LPTK dalam Paradigma Pendidikan Inklusi**  
(Makalah dalam Temu Ilmiah Nasional PLB , 27-29 Agustus 2003 di Surabaya)